

# Free, Prior and Informed Consent<sup>1</sup>

A field guide for activists<sup>2</sup>

Working Draft, March 2006<sup>3</sup>

## Forest Peoples Programme

1c Fosseway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh  
GL56 9NQ, UK. *tel:* (44) 01608 652893 *fax:* (44) 01608 652878  
*email:* [marcus@forestpeoples.org](mailto:marcus@forestpeoples.org) *web:* [www.forestpeoples.org](http://www.forestpeoples.org)

---

<sup>1</sup> FPIC

<sup>2</sup> Sebuah panduan lapangan bagi para aktifis

<sup>3</sup> Naskah Kerja, Maret 2006

Free, Prior and Informed Consent: a guide for activists was first published in 2006 by Forest Peoples Programme<sup>4</sup>

Copyright@ FPP, + others

All rights reserved. Sections of this book may be reproduced in magazines and newspapers provided that acknowledgement is made to the author and to Forest Peoples Programme<sup>5</sup>

Forest Peoples Programme  
1c Fosseway Business Centre  
Stratford Road  
Moreton-in-Marsh  
GL56 9NQ  
England  
Tel: 01608 652893  
Fax: + 44 1608 652878  
Email: [info@forestpeoples.org](mailto:info@forestpeoples.org)  
Web: [www.forestpeoples.org](http://www.forestpeoples.org)

This publication is also available in Spanish, French and Bahasa Indonesia (soon hopefully!).<sup>6</sup>

Free, Prior and Informed Consent: a guide for activists  
Marcus Colchester, Forest Peoples Programme<sup>7</sup>

Cover photo: Marcus Colchester. A workshop on Oil Palms, Land Acquisition and Free, Prior and Informed Consent in Pontianak, Indonesia, June 2005.<sup>8</sup>

ISBN: number needed

---

<sup>4</sup> **FPIC: sebuah panduan bagi para aktifis** pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 oleh Forest Peoples Programme

<sup>5</sup> Hak cipta dilindungi. Bagian tertentu buku ini dapat dicetak ulang dalam majalah dan koran asalkan menyebutkan penulis dan Forest Peoples Programme

<sup>6</sup> Publikasi ini juga tersedia dalam bahasa Spanyol, Perancis dan Bahasa Indonesia (diharapkan segera!)

<sup>7</sup> **FPIC: sebuah panduan bagi para aktifis**, Marcus Colchester, Forest Peoples Programme

<sup>8</sup> Foto sampul: Marcus Colchester. Lokakarya tentang Kelapa Sawit, Pengadaan Lahan dan FPIC

## Contents - Isi

What is Free, Prior and Informed Consent (FPIC) ? Apa itu FPIC atau Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (*Informed*) sebelum (*Prior*) sebuah program atau proyek investasi dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (*Free*) menyatakan setuju (*consent*) atau menolak atau dengan kata lain sebuah hak masyarakat (adat) untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam tanah adat mereka.

Why is it important? Mengapa FPIC begitu penting?

A basis in international law - Sebuah landasan dalam hukum internasional

International 'best practice' standards - Standar Tata-kelola Terbaik' Internasional

National legal underpinnings - Pilar-penyangga dalam hukum nasional

Problems in the law - Berbagai permasalahan dalam hukum

Establishing customary rights to land and other resources - Menegakan hak ulayat/adat atas tanah dan sumber (daya) lainnya

Demonstrating rights to lands and other resources - Membuktikan hak atas tanah dan sumber daya lainnya

Lessons from mapping indigenous lands - Beberapa pembelajaran dari pemetaan tanah adat/ulayat

Systems of representation - Sistem perwakilan

Customary institutions - Lembaga-lembaga adat

Systems of decision-making - Sistem pembuatan keputusan

Deciding on a process - Menentukan sebuah proses

Getting the right advice - Mendapatkan nasehat yang benar

Assess your counterparts - Menilai rekan anda

Entering into negotiations - Masuk kedalam perundingan

Negotiation tactics - Taktik perundingan

Reaching agreement - Mencapai kesepakatan

Monitoring compliance - Memantau pemenuhan

Dealing with grievances - Menangani pelanggaran

Legalising agreements - Mengesahkan kesepakatan

Resources - Sumber pustaka

## **What is Free, Prior and Informed Consent?** **Apakah yang dimaksud dengan FPIC ?**

Free, Prior and Informed Consent is a right of indigenous peoples to decide what kinds of activities they want to allow on their lands. **FPIC** adalah suatu hak masyarakat adat untuk menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada tanah mereka.

It means recognition of the people's right to say 'Yes !', or 'No !' Itu berarti pengakuan terhadap hak rakyat untuk mengatakan 'Ya!', atau 'Tidak!'

It means that outsiders, who want access to indigenous peoples' territories, should deal with them as legitimate owners, as peoples endowed with rights, with authority over their areas. Artinya, pihak (orang) luar, yang menginginkan pintu masuk menuju wilayah-wilayah masyarakat adat, harus berurusan dengan mereka sebagai pemilik yang sah, sebagai orang yang dikaruniai hak dengan kekuasaan atas seluruh wilayah mereka.

It means respecting indigenous peoples' customary systems of decision-making and their self-chosen representatives. Itu berarti menghargai sistem (tata-cara) adat masyarakat adat dalam pembuatan keputusan dan menentukan sendiri perwakilan mereka.

It means that if outsiders want to access indigenous peoples' territories then they should explain what they want to do, and negotiate with the people concerned., knowing that the people may or may not agree to what is proposed. Itu berarti bahwa jika pihak (orang) luar mau masuk kedalam wilayah-wilayah masyarakat adat mereka harus menjelaskan apa yang ingin mereka lakukan, dan berunding dengan rakyat yang bersangkutan, mengetahui apakah rakyat mungkin atau mungkin tidak setuju terhadap apa yang diusulkan.

All the words in the phrase are equally important: Semua kata-kata yang terdapat dalam kalimat tersebut sama pentingnya:

**'Free'** – decisions should be reached through processes of mutual respect without recourse to violence, coercion, intimidation, threat or bribery. There should be no assumed outcome of the negotiation. **'Bebas'** – keputusan-keputusan hendaknya dicapai melalui proses-proses saling menghargai tanpa kekerasan, tekanan, gertakan, ancaman atau penyuapan.

**'Prior'** - negotiations should be undertaken before governments, investors and companies have decided what they plan to do. It means negotiations before the bulldozers come in and before surveyors and prospectors snoop around on people's lands.

**'Sebelum'** – perundingan-perundingan seharusnya dilakukan sebelum pemerintah, pemodal dan perusahaan telah memutuskan apa rencana untuk dikerjakan. Itu berarti perundingan-perundingan sebelum bulldozer datang dan sebelum orang-orang datang untuk mengukur dan melihat-lihat sekitar tanah-tanah rakyat.

**'Informed'** – outsiders should provide all the information they have to the people, relevant to the proposed intervention, in forms and languages that the people can understand. It means giving the communities time to read, assess and discuss this information. It means taking time to gather, with the people's participation if they want, the relevant information, so people know what the implications of the proposal are. **'Diinformasikan'** – pihak (orang) luar harus memberikan semua informasi yang mereka miliki kepada rakyat, sesuai intervensi (kegiatan) yang direncanakan, dalam bentuk-bentuk dan bahasa yang dapat dipahami rakyat. Itu berarti memberikan waktu kepada komunitas untuk membaca, menilai dan membicarakan keterangan ini. Itu berarti memerlukan waktu untuk berkumpul, dengan partisipasi semua orang jika mereka mau, keterangan yang sesuai, sehingga orang tahu apa implikasi dari usulan (proposal) tersebut.

**'Consent'** – any decisions or agreements reached should be made through an inclusive and phased process that respects customary laws and the authorities that the people themselves have chosen. It means an end to decisions being signed off by an imposed community 'leader' without reference to the community members. **'Persetujuan'** – apapun keputusan atau kesepakatan yang dicapai harus dibuat melalui sebuah proses terbuka dan bertahap yang menghargai hukum adat dan otoritas yang dipilih oleh mereka sendiri. Itu berarti sebuah akhir terhadap berbagai keputusan ditanda-tangani oleh seorang 'tokoh' masyarakat yang dipaksakan tanpa keterangan kepada anggota komunitas.

**It means justice for indigenous peoples.! Itu berarti keadilan bagi masyarakat adat.!**

## **Why is it important? Mengapa FPIC begitu penting?**

Typically, development and conservation schemes are imposed on indigenous peoples without consultation, participation or negotiation – without respect for their rights. Secara khusus, skema pembangunan dan konservasi dipaksakan kepada masyarakat adat tanpa konsultasi, partisipasi atau perundingan – tanpa menghormati terhadap hak-hak mereka.

The results are that the people find their forests logged, their lands mined, their valleys flooded, their hunting grounds fenced off, their farms colonised, their customary authorities humiliated, all without them having had any say in the process, and often without them seeing any of the benefits. Hasilnya adalah bahwa rakyat mendapatkan hutan ditebang, tanah-tanah mereka ditambang, lembah-lembah mereka kebajiran, wilayah berburu mereka dipagari, ladang mereka diduduki, lembaga adat mereka dihina, semuanya tanpa ada kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan suara dalam proses tersebut, dan seringkali tanpa mereka lihat apapun manfaatnya bagi mereka.

They may be forcibly resettled, they may be forced to leave their lands and ‘retrained’ to service the national society’s needs but not to meet their own priorities. Usually this means that they end up poorer and worse off than before. Mereka mungkin secara paksa dipindahkan, mereka mungkin dipaksa meninggalkan tanah-tanah mereka dan ‘dilatih-kembali’ untuk melayani kebutuhan masyarakat nasional tetapi tidak untuk memenuhi kebutuhan utama. ini berarti bahwa mereka akhirnya menjadi lebih miskin dan jauh menderita daripada sebelumnya.

Often this happens because indigenous peoples are considered backward, ignorant, poor and in need of guidance. Sometimes it happens because outsiders know nothing about indigenous peoples and don’t even realise they are endowed with rights and freedoms like all human beings. Too often it is allowed to happen because outsiders stand to reap profits from these interventions. Seringkali ini terjadi karena masyarakat adat dianggap terbelakang, terabaikan, miskin dan memerlukan bimbingan. Kadang-kadang hal ini terjadi karena pihak luar tidak mengetahui tentang masyarakat adat dan tidak juga menyadari masyarakat adat memiliki hak-hak dan kebebasan seperti pada semua umat manusia. Terlalu sering dibiarkan terjadi karena pihak luar berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari intervensi tersebut.

Properly applied Free, Prior and Informed Consent processes should stop these abuses. Cara-cara penerapan FPIC yang benar harus menghentikan penyimpangan-penyimpangan tersebut.

It evens up relations between communities and outsiders, because it means respecting communities’ rights to their territories and to decide what they want done on their land. Proses-proses ini menyetarakan hubungan antara komunitas dan pihak luar, karena ini bermakna menghargai hak-hak komunitas atas wilayah-wilayah mereka dan untuk menentukan apa yang ingin mereka lakukan pada tanah mereka.

It should mean that developments only go ahead once **and if** indigenous peoples have accepted that proposed activities will benefit them. It should mean that developments that can only harm them do not go ahead because the people will refuse them. Ini hendaknya berarti bahwa pembangunan hanya dapat dilanjutkan ketika **dan jika** masyarakat adat telah menerima bahwa kegiatan-kegiatan yang ditawarkan akan menguntungkan mereka. Artinya bahwa pembangunan yang hanya dapat membahayakan mereka tidak boleh diteruskan karena rakyat akan menolak mereka.

**But getting it right is not easy.** Exercising the right to Free, Prior and Informed Consent means people need to be well organised, can reach agreement among themselves, can make sense of proposals and are able to assert their views in negotiations. Free, Prior and Informed Consent (FPIC) processes **can be manipulated. Tetapi menjadikannya benar tidaklah mudah.** Menerapkan hak atas FPIC berarti rakyat harus diorganisir dengan baik, dapat mencapai kesepakatan antar sesama mereka, dapat memahami usulan dan dapat menegaskan pendapat mereka dalam berbagai perundingan. Proses-proses FPIC dapat dimanipulasi.

This booklet is designed to help people make the most of FPIC. It has been written for use by old and **young**, by community members and activists. It is to be read, and read out to others who can’t read. It is an evolving document. If you think it can be improved, tell us! Buku kecil ini dibuat untuk membantu orang membuat banyak hal bagi FPIC. Buku ini disusun untuk digunakan oleh tua dan muda, oleh anggota masyarakat dan para aktifis. Buku ini untuk dibaca, dibaca kepada mereka yang tidak bisa membaca. Buku ini adalah dokumen yang terbuka dikembangkan. Jika anda piker buku ini dapat diperbaiki, mohon sampaikan kepada kami!








## **A basis in international law** **Sebuah dasar dalam hukum internasional**

There are many international laws. The most important are treaties agreed between countries, signed by governments and, where necessary, ratified by parliaments. By signing these treaties, countries agree to govern their peoples and lands in accordance with international standards. These treaties deal with important matters like human rights, the rights of workers, women and children and care for the environment. Ada banyak hukum internasional. Yang paling penting adalah fakta (perjanjian) yang disepakati antara bangsa-bangsa, ditanda-tangani oleh pemerintah dan, dimana diperlukan, disyahkan oleh parlemen. Dengan menanda-tangani kesepakatan (fakta) tersebut, semua negara setuju untuk mengatur rakyat dan tanah-tanah mereka sesuai dengan standar internasional. Perjanjian-perjanjian tersebut berkaitan dengan hal-hal penting seperti HAM, hak-hak pekerja, perempuan dan anak-anak serta kepedulian terhadap lingkungan.

International treaties are laws that are binding on governments and, in some circumstances, they can be enforced through international courts and tribunals. Perjanjian internasional adalah hukum yang mengikat pemerintah dan, dalam keadaan tertentu, mereka dapat ditegakkan melalui lembaga dan pengadilan internasional.

Judgements of these courts and the carefully weighed decisions of international human rights committees have accepted that indigenous peoples have the right to Free, Prior and Informed Consent, based on the right of all peoples to self-determination. Keputusan-keputusan semua peradilan tersebut dan keputusan yang dipertimbangkan sangat berhati-hati oleh panitia HAM internasional telah menerima bahwa masyarakat adat berhak atas FPIC, berdasarkan hak semua orang untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Key pieces of international law that are considered to secure this right to Free, Prior and Informed Consent include: Beberapa hukum internasional yang dianggap menjamin hak atas Persetujuan Bebas tanpa paksa, Didahulukan dan Diinformasikan termasuk:

-  International Covenant on Civil and Political Rights Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
-  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
-  Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial
-  Inter-American Declaration of Human Rights Deklarasi HAM Antar-Amerika
-  The Right has also been explicitly endorsed in the draft United Nations' Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Hak ini juga secara tegas diterima didalam naskah Deklarasi tentang Hak-hak Masyarakat Adat
-  The earlier International Labour Organisation's Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples expects governments to try to secure consent but it is not a binding requirement. It is helpful, though, because it explains how governments should respect indigenous peoples' own institutions in decision-making. Konvensi Organisasi Buruh Internasional terbaru No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Suku Bangsa mengharapakan pemerintah untuk mencoba memastikan persetujuan tetapi tidak merupakan persyaratan yang bersifat mengikat. Walaupun demikian, tentunya diharapkan, karena ini menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya menghargai lembaga masyarakat adat itu sendiri dalam pembuatan keputusan.
-  The Convention on Biological Diversity has also been interpreted by governments as requiring Free, Prior and Informed Consent for the use of indigenous peoples' knowledge and that international laws be respected in setting up protected areas. Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati ditafsirkan oleh pemerintah sebagai persyaratan FPIC untuk menerapkan pengetahuan masyarakat adat dan hukum internasional diakui dalam menyusun kawasan-kawasan yang dilindungi.

## **International ‘best practice’ standards Standar ‘tata-kelola terbaik’ internasional**

Governments have moved slowly to apply these laws. International Commissions, non-governmental initiatives and responsible business leaders have moved ahead of them to develop ‘best practice’ standards that go beyond the way many governments understand the law. Free, Prior and Informed Consent has thus been widely accepted as the right way to do business by a large number of ‘sectors’. Pemerintah telah pelan-pelan menerapkan hukum tersebut. Komisi Internasional, inisiatif non-pemerintah dan tokoh bisnis bertanggung jawab telah bergerak untuk mengembangkan standar ‘tata-kelola terbaik’ yang melebihi cara sebagian besar pemerintahan didunia memahami hukum tersebut. Oleh karena itu, FPIC telah diterima secara luas sebagai cara yang benar untuk melakukan usaha oleh banyak sektor.

**Dams** – the World Commission on Dams, an international Commission set up by the World Bank and World Conservation Union, accepted that indigenous peoples have the right to FPIC – to decide whether or not they want dams on their lands. **Bendungan – Komisi Dunia tentang Bendungan, sebuah Komisi Internasional dibentuk oleh Bank Dunia dan Uni Konservasi Dunia, menerima bahwa masyarakat adat memiliki hak atas FPIC – untuk apakah menerima bendungan ditanah-tanah mereka atau tidak.**

**Mines, oil and gas** – the World Bank’s Extractive Industries Review has also accepted that indigenous peoples have the same right to decide whether or not mines, oil wells or gas extraction should be developed on their lands. **Tambang, minyak dan gas – Tinjauan Industri Galian Bank Dunia juga telah menerima bahwa masyarakat adat memiliki hak yang sama untuk memutuskan apakah tambang, sumur minyak atau gas galian harus dibangun pada tanah-tanah mereka atau tidak.**

**Logging – HPH** - the Forest Stewardship Council (FSC) requires loggers to recognise and respect the customary rights of indigenous peoples, that they should control forest management and only delegate control with their free and informed consent. **Pembalakkan – HPH - Forest Stewardship Council (FSC) mewajibkan pembalok (penebang kayu) untuk mengakui dan menghargai hak ulayat/adat masyarakat adat, bahwa mereka seharusnya menguasai pengelolaan hutan dan hanya menitipkan penguasaan dengan Persetujuan Bebas dan diinformasikan oleh mereka.**

**Timber Plantations – HTI** - the FSC applies the same standard to timber plantations and rules out plantations established in areas of high conservation value after 1995. **Hutan Tanaman – HTI - Setelah tahun 1995, FSC menerapkan standar dan peraturan yang sama terhadap hutan tanaman industri.**

**Oil palms – HGU** – the Roundtable on Sustainable Palm Oil requires that no plantings are established on indigenous peoples’ lands without free, prior and informed consent and do not limit their customary rights without negotiated agreements. **Perkebunan Kelapa Sawit – HGU – Roundtable on Sustainable Palm Oil mewajibkan bahwa tidak ada penanaman yang dikembangkan pada tanah masyarakat adat tanpa FPIC serta tidak membatasi hak-hak adat mereka tanpa kesepakatan yang dirundingkan.**

**Protected Areas** – the World Commission on Protected Areas, World Conservation Union and WWF accept that national parks and nature reserves should only be set up with respect for indigenous peoples’ rights, with their consent and negotiated agreements. **Wilayah yang dilindungi – Komisi Dunia tentang Wilayah yang Dilindungi, Uni Konservasi Dunia dan WWF menerima bahwa kawasan taman nasional dan cadangan alam hanya ditetapkan dengan penghargaan atas hak-hak masyarakat adat, dengan persetujuan mereka dan kesepakatan yang dimusyawarahkan.**

**Development agencies** – a large number of development agencies also accept the principle, some clearly like the UNDP and EC, some partially like the Inter-American Development Bank, and some less clearly like the World Bank. **Lembaga Pembangunan – Beberapa Lembaga Pembangunan juga menerima prinsip, diantaranya UNDP dan Komisi Eropa dengan tegas, sebagian lagi, misalnya Bank Pembangunan Antar-Amerika, dan ada yang kurang jelas seperti Bank Dunia.**

## National legal underpinnings Tonggak-dasar Hukum Nasional

Indonesia has ratified: Indonesia telah meratifikasi:

- 👍 International Covenant on Civil and Political Rights Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
- 👍 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- 👍 Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
- 👍 Convention on Biological Diversity Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati

This means that the principle of Free, Prior and Informed Consent should be respected in Indonesia. Ini berarti bahwa prinsip Persetujuan Bebas tanpa paksa, didahulukan dan diinformasikan sesungguhnya dihormati di Indonesia.

There are a number of pieces of national law which reinforce the rights of indigenous peoples. Ada beberapa hukum nasional yang memperkuat hak-hak masyarakat adat.

- 👍 The Constitution of the Republic of Indonesia recognises the right of indigenous peoples as self-governing communities Konstitusi Republik Indonesia mengakui hak masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki pemerintahan sendiri.
- 👍 The Decentralization Acts recognise the right of district and provincial legislatures to establish local systems of administration and for controlling natural resources. Undang-Undang Otonomi Daerah mengakui hak dewan perwakilan propinsi dan kabupaten untuk membentuk sistem lokal pelaksanaan dan untuk pengaturan sumber daya alam.
- 👍 On the basis of these acts local legislatures have passed local laws (*Perda*) recognising indigenous territories, customary authorities and jurisdictions. Berdasarkan asas-asas hukum tersebut dewan perwakilan kabupaten telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengakui wilayah, lembaga dan peraturan adat.
- 👍 The National Assembly passed TAP MPR IX/2001, which requires reform of outdated laws so that customary rights are respected MPR-RI mengeluarkan TAP MPR IX/2001, yang mewajibkan reformasi hukum sehingga hak ulayat/adat diakui
- 👍 Custom (*adat*) is affirmed as the basis for rights in land by the Basic Agrarian Law of 1960, UUPA. Adat ditegaskan sebagai dasar bagi hak pada tanah oleh Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960
- 👍 A regulation was passed in 1999 setting out a process for recognising collective rights in land (*hak ulayat*) Sebuah peraturan dikeluarkan pada tahun 1999 mengatur suatu proses untuk mengakui hak-hak kolektif pada tanah (*hak ulayat*)
- 👍 The Forestry Law requires teams, including community representatives, to establish the boundaries of State Forests (*berita acara tata batas*) through negotiated agreements. Undang-Undang Kehutanan mewajibkan tim, termasuk utusan komunitas, untuk membentuk batas-batas Hutan Negara (*berita acara tata batas*) melalui musyawarah mufakat.
- 👍 The Forestry Department has issued a circular (*Surat Edaran*) asking district authorities to recognise community rights in forests Departemen Kehutanan mengeluarkan surat edaran meminta pemerintah daerah untuk mengakui hak masyarakat pada hutan

## Problems in the law Permasalahan dalam Hukum

There are however elements in Indonesian law that are hostile to indigenous peoples and their right to Free, Prior and Informed Consent. Walaupun begitu, ada beberapa unsur hukum Indonesia yang bertentangan dengan masyarakat adat dan hak mereka atas FPIC.

- 👉 The Local Administration Act of 1979 imposed a uniform system of administration and did away with customary institutions. Although this law was repealed in 1999, in many parts of Indonesia the system of *kecamatan, desa, kampung* still operates, masking customary systems of representation. UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memaksakan penyeragaman sistem pemerintahan dan menjauhkan kelembagaan adat. Walaupun UU ini dicabut pada 1999, dibanyak daerah di Indonesia sistem kecamatan, desa, kampung masih berlaku, menyembunyikan representasi sistem adat.
- 👉 The Basic Agrarian Law (UUPA ) does not recognise *hak ulayat* as a land title and requires that customary rights holders should, relinquish their rights in land when this is judged to be in the national interest. UUPA tidak mengakui hak ulayat sebagai hak tanah dan mewajibkan pemilik hak ulayat supaya, melepaskan hak mereka pada tanah ketika ini diputuskan menjadi kepentingan nasional.
- 👉 Likewise, the Forestry Act, while recognising ‘customary forests’ (*hutan adat*) considers these areas to be parts of State Forest Areas, which are defined as areas without rights. Demikian pula, UU Kehutanan, pengakuan ‘hutan adat’ memandang kawasan-kawasan tersebut menjadi bagian dari Kawasan Hutan Negara yang didefinisi sebagai kawasan tanpa hak.
- 👉 The Mining Act... UU No. ...tahun 1967.. tentang Pertambangan
- 👉 The Plantation Act... UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan
- 👉 Regulations under the Forestry Act establish that customary rights cannot be invoked to refuse access to logging. Peraturan dibawah UU Kehutanan menegaskan bahwa hak ulayat tidak dapat digunakan untuk menolak akses atas pembalakan.
- 👉 The Constitution and Basic Agrarian Law establishes the authority of the government to allocate lands and natural resources for the benefit of the Nation. Konstitusi dan UUPA menentukan kewenangan pemerintah untuk mengalokasikan lahan dan sumber daya alam untuk kepentingan bangsa.
- 👉 The Land Acquisition laws allow the State to expropriate people’s lands and natural resources in the national interest, while recognising the need for consultation and the payment of due compensation, even where this is against people’s will. Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Lahan (Land Acquisition) memungkinkan negara memaksa mengambil tanah dan sumber daya alam milik rakyat atas nama kepentingan nasional, disatu sisi mengakui pentingnya konsultasi dan pembayaran kompensasi yang layak, walapun hal ini bertentangan dengan keinginan rakyat.
- 👉 Almost any activity set out in national development plans (*Pelita*) or even provincial spatial land use plans (check) can be interpreted as being in the ‘national interest’. Hampir setiap kegiatan yang disusun dalam perencanaan pembangunan nasional (Pelita) ataupun perencanaan tata ruang propinsi dapat ditafsirkan sebagai bagian ‘kepentingan nasional’.

**These laws should have been reassessed in the light of TAP MPR IX/2001 and Indonesia’s obligations under international law,  
but this has not yet happened. Semua peraturan hukum ini harusnya telah kaji-ulang sesuai dengan TAP MPR IX/2001 dan kewajiban Indonesia dalam hukum internasional**

## **Establishing customary rights to land and other resources** **Menegakan hak ulayat atas tanah dan sumber daya lainnya**

Free, Prior and Informed Consent is the right of indigenous people to make decisions about their future with relation to lands or other resources to which they have **established** rights. FPIC adalah hak masyarakat adat untuk membuat keputusan tentang masa depan mereka berkaitan dengan tanah atau sumber daya lainnya terhadapnya mereka memiliki hak yang syah.

In other words it's a right of indigenous peoples' to control the use of their properties. The right is not much use unless rights to those properties are **established**. And its hard to exercise this right unless these established rights are also **recognised** by the government or third parties. Still, it's important not to confuse how people's rights are **established** with how they are **recognised**. Dengan kata lain, adalah suatu hak masyarakat adat untuk menguasai penggunaan harta benda milik mereka. Hak ini tidak banyak dipakai kecuali hak atas harta milik **dikukuhkan**. Dan adalah sulit untuk menerapkan hak ini jika hak-hak yang dikukuhkan juga **diakui** oleh pemerintah atau pihak ketiga. Namun, adalah penting untuk tidak mengacaukan bagaimana hak rakyat **dikukuhkan** dengan bagaimana mereka **diakui**.

Indigenous peoples **establish** their rights to their lands and other resources on the basis of customary law, customary occupation and use. Masyarakat adat **mengukuhkan** hak mereka atas tanah-tanah dan sumber daya lainnya sesuai dengan dasar hukum adat, penguasaan dan pemanfaatan secara adat.

International law recognises that **indigenous peoples' rights do not depend on an act of the State** because their rights derive from their own laws and practices. Their rights may even precede the existence of the State, or may have been established before the State asserted effective jurisdiction over an indigenous people's area. Hukum internasional mengakui bahwa **hak-hak masyarakat adat tidak tergantung pada sebuah hukum negara** karena hak-hak mereka berasal dari kebiasaan dan hukum yang mereka miliki. Hak-hak mereka mungkin mendahului keberadaan negara, atau mungkin telah dikukuhkan sebelum negara diakui

Indigenous peoples don't have to show they were the **first** peoples in an area, merely that they exercised rights in the areas before any other claimants and before the State was able to administer the area effectively. This is because human rights are considered to be inherent not grants of a government. We all have rights because we are human beings not because the State recognises us or our rights. Masyarakat adat tidak perlu menunjukkan mereka merupakan orang **pribumi** dalam sebuah kawasan, jelas bahwa mereka telah menerapkan hak-hak didalam kawasan tersebut sebelum pihak lain manapun mengklaim dan sebelum negara bisa memerintah kawasan tersebut dengan efektif. Hal ini karena hak asasi manusia dianggap sebagai hak bawaan bukan merupakan pemberian dari sebuah pemerintahan. Kita semua memiliki hak asasi karena kita adalah umat manusia bukan karena negara mengakui kita atau hak-hak kita.

In this sense, Indonesian law is progressive. **Adat** is recognised as a source of rights. Dalam hal ini, hukum Indonesia sangat maju. **Adat** diakui sebagai suatu sumber hak.

Moreover, under Article 10c of the Convention on Biological Diversity, the government of Indonesia should '*protect and encourage customary use of biological diversity in accordance with traditional cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requirements.*' Lebih lanjut, dalam Pasal 10c Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, Pemerintah Indonesia harus '*melindungi dan mendorong pemanfaatan secara adat terhadap keanekaragaman hayati sesuai dengan kebiasaan budaya yang cocok dengan konservasi atau persyaratan pemanfaatan yang berkelanjutan.*'

In many parts of Indonesia, the government does not yet effectively administer lands and resources. Only about 12% of forests have ever been surveyed and gazetted. Less than half of all individual land properties have ever been titled. As for customary tenures, like *hak ulayat*, very few of these have been registered. Dibanyak daerah di Indonesia, pemerintah belum sepenuhnya dengan baik menata pertanahan dan sumber daya alam. Hanya sekitar 12% dari hutan telah diukur dan dikukuhkan. Kurang dari setengah dari semua tanah milik individu sudah pernah didaftar. Sedangkan untuk kepemilikan adat, seperti hak ulayat, sangat sedikit sekali yang telah didaftarkan.

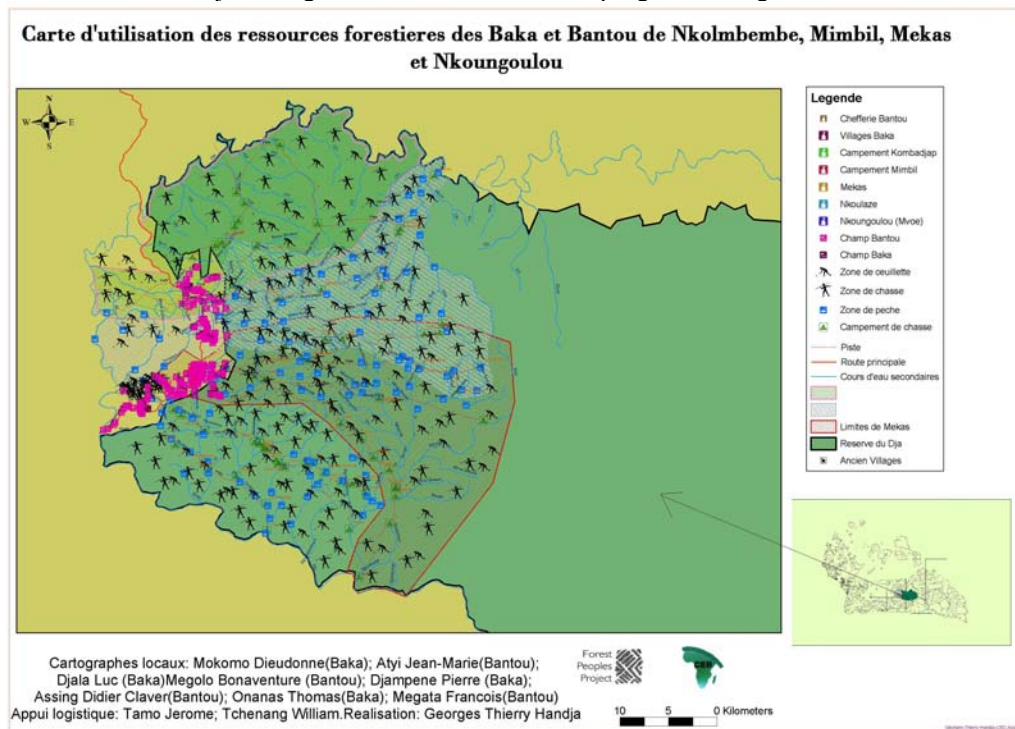
## Demonstrating rights to lands and other resources Membuktikan hak atas tanah dan sumber daya lainnya

A crucial step in asserting indigenous peoples' rights is to demonstrate the **nature** and **extent** of their customary rights in land. Indigenous peoples have recourse to various measures to demonstrate their rights. Sebuah langkah penting dalam menegaskan hak-hak masyarakat adat adalah membuktikan sifat-dasar dan luasan hak ulayat mereka pada tanah. Masyarakat adat memiliki acuan berbagai cara untuk membuktikan hak-hak mereka.

Their rights may have already been formally recognised by the administration. For example, in West Sumatra, the government recognises *Negeri* both as the form of self-government of the Minangkabau people and as having authority over *Negeri* properties. Few *Negeri* boundaries have been surveyed, however. Hak-hak mereka mungkin secara resmi diakui oleh pemerintahan. Misalnya di Sumatra Barat, pemerintah mengakui Nagari sebagai bentuk pemerintahan-sendiri orang Minangkabau dan memiliki otoritas atas berbagai kekayaan Nagari. Walaupun demikian, hanya sedikit batas-batas Nagari yang sudah diukur.


Another way of demonstrating rights is to document the **nature** of customary laws, uses and properties. Few non-indigenous people understand how subtle and complex indigenous peoples' laws and tenures are: for example, how in Kalimantan an individual's rights to own, inherit and even lease their farm lands are nested within wider collective territories owned by the whole group. Cara lain untuk membuktikan hak adalah mendokumentasikan sifat-dasar hukum adat, bentuk penerapan dan berbagai perangkatnya. Sedikit sekali mereka yang bukan masyarakat adat memahami betapa halus dan kompleksnya hukum adat dan kepemilikan masyarakat adat: misalnya, bagaimana di Kalimantan hak perorangan untuk memiliki, secara turun temurun dan bahkan penyewaan tanah-tanah ladang mereka menyatu kedalam tanah-wilayah bersama yang dimiliki oleh keseluruhan kelompok.


One of the best ways of demonstrating the **extent** of indigenous rights is through mapping. Using geomatic technologies, like GPS, it is now relatively cheap, quick and simple to map the boundaries of indigenous lands and the forms of customary land use within these areas. Here is a map made by some Baka and Bantu in Cameroon to show how their rights overlap a national park. Salah satu cara terbaik membuktikan luasan hak ulayat/adat adalah melalui pemetaan. Menggunakan teknologi geomatis, seperti GPS, sekarang ini tidaklah begitu mahal, cepat dan mudah untuk memetakan batas-batas tanah adat dan bentuk-bentuk pemanfaatan tanah didalam kawasan tersebut. Berikut adalah sebuah contoh peta yang dibuat orang-orang Baka dan Bantu di Kamerun untuk menunjukkan bagaimana hak-hak mereka tumpang tindih dengan sebuah taman nasional.





### Lessons from mapping indigenous lands Pembelajaran dari pemetaan tanah adat


Participatory mapping has been widely applied in indigenous peoples' areas since the late 1980s. A lot of lessons have been learned as a result. Among the most important are: Pemetaan partisipatif telah secara luas diterapkan di wilayah masyarakat adat sejak akhir tahun 1980an. Banyak pembelajaran telah dipelajari sebagai sebuah hasil. Diantara yang paling penting adalah:


- 


Ensure that the maps are made with the full awareness and agreement, and under the control of, the communities involved Memastikan bahwa peta-peta tersebut dibuat dengan kesadaran dan kesepakatan penuh, dan dibawah kendali dari masyarakat yang terlibat
- 


Involve members of the communities at all stages of the mapping from deciding what information is relevant, through gathering the information in the field, to recording and displaying the information on the base maps. Melibatkan anggota masyarakat pada semua tahapan pemetaan dari memutuskan informasi apa yang relevan, melalui pengumpulan informasi di lapangan, untuk mencatat dan menunjukan informasi dalam peta-peta dasar.
- 


Record both land uses and boundaries, wherever possible. Put the indigenous peoples' own location names, land use categories and **terms** for vegetation types onto the maps. Sedapat mungkin mencatat pemanfaatan lahan dan batas-batas. Memasukan nama-nama lokasi sesuai nama masyarakat adat, kategori pemanfaatan lahan dan istilah-istilah untuk jenis-jenis tanaman kedalam peta-peta tersebut.
- 


Make sure that all generations are involved. Elders are often the most knowledgeable about sites of historical and cultural importance. Memastikan bahwa semua generasi terlibat. Orang tua seringkali yang paling mengetahui tentang wilayah-wilayah sejarah dan nilai-nilai budaya.
- 

Involve both men and women in mapping. Men and women tend to use lands and resources differently – both systems are valid and need protection. Melibatkan laki-laki dan perempuan dalam pemetaan. Lak-laki dan perempuan cenderung memanfaatkan lahan dan sumber daya secara berbeda – keduanya benar dan perlu perlindungan.
- 

Where two or more ethnic groups use the same area, involve both in the mapping. Both have rights. Asserting the rights of only one group is likely to lead to conflict and weaken the claims of both. Dimana dua atau lebih kelompok suku memanfaatkan kawasan yang sama, libatkan keduanya dalam pemetaan. Keduanya punya hak. Menegaskan hak hanya satu kelompok cenderung mengarah pada konflik dan memperlemah pengakuan keduanya.
- 

Involve neighbouring communities in mapping boundaries that run alongside their lands. If boundaries are later disputed by neighbours land claims are likewise weakened. Melibatkan komunitas tetangga dalam pemetaan batas-batas yang berada pada masing-masing tanah mereka. Jika batas-batas tersebut dikemudian hari disengketakan oleh pengakuan lahan tetangga juga sebaliknya kurang.
- 

Ensure that draft maps are carefully checked over by community members, and revised if necessary, before being used in negotiations with third parties. Memastikan peta-peta mentah diperiksa dengan teliti oleh anggota masyarakat, direvisi jika perlu, sebelum digunakan dalam negosiasi-negosiasi dengan pihak ketiga.
- 

Where national laws allow, get the intellectual property rights to the maps and databases registered as property of the people or communities concerned. Dimana hukum nasional memungkinkan, masukan hak-hak kepemilikan intelektual kedalam peta dan database yang didaftar sebagai kepemilikan rakyat atau komunitas yang bersangkutan.
- 

Take measures to protect the use of the information, so it is not misrepresented or distorted by other interests. Buat aturan untuk melindungi pemanfaatan informasi, sehingga informasi tidak disalah-tafsirkan atau diselewengkan oleh kepentingan orang lain.

## Systems of representation Sistem representasi

Free, Prior and Informed Consent means that communities or peoples should be represented by institutions of their own choosing. These institutions may be: FPIC berarti bahwa komunitas atau rakyat seharusnya diwakili oleh lembaga-lembaga yang mereka pilih sendiri. Lembaga-lembaga tersebut mungkin:



the people's own customary institutions. Lembaga adat rakyat itu sendiri



institutions that have been imposed by the State but later accepted by the people, lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara tetapi kemudian diterima oleh rakyat



or novel institutions set up by the people themselves to deal with outsiders. Atau lembaga baru dibentuk oleh rakyat sendiri untuk berurusan dengan pihak luar.

There is no rule to say which is the best – circumstances vary too much. The important thing is that the people should themselves choose how they want to be represented – they don't have to accept the institutions chosen or imposed by others. They can also choose to be represented through several institutions, not just one. Tidak ada aturan yang menyatakan mana yang terbaik – keadaan bisa sangat berbeda. Hal yang penting adalah bahwa seharusnya rakyat sendiri memilih bagaimana mereka ingin diwakili – mereka tidak harus menerima lembaga-lembaga yang dipilih atau dipaksakan oleh pihak lain. Mereka dapat juga memilih untuk diwakili melalui beberapa lembaga, tidak hanya satu.

One of the most complicated issues is deciding what should be the units of negotiation and representation in dealing with outsiders. Is it best for each family to represent itself directly? Is it better to represent yourselves collectively as a whole village? Or is it better for a group of related communities to be represented jointly? Or negotiate as a wider group of affected peoples? Salah satu isu yang paling rumit adalah memutuskan apa yang seharusnya menjadi unit-unit negosiasi dan representasi dalam berurusan dengan pihak luar. Apakah sebaiknya untuk masing-masing keluarga langsung mewakili untuk dirinya sendiri? Apakah sebaiknya anda bersama beberapa orang untuk mewakili suatu kampung sebagai keseluruhan? Atau apakah lebih baik bagi sebuah kelompok dari komunitas-komunitas yang bersangkutan diwakili secara bersama-sama? Atau berunding sebagai sebuah kelompok yang lebih luas dari rakyat yang terkena dampak?

Choosing how you are going to represent yourselves is one the most important steps in preparing for negotiations. Take into account: who will be affected; how much you can trust, or know how to work with, more distant communities; the scale of the intervention. Memilih bagaimana anda akan mewakili diri anda sendiri adalah salah satu dari sekian banyak langkah yang paling penting dalam persiapan untuk negosiasi. Perhitungkan: siapa yang akan terkena dampak; seberapa banyak anda dapat percaya, atau tahu bagaimana berkerja dengan, komunitas-komunitas yang lebih jauh; skala intervensi.

The risks to bear in mind are: Resiko untuk dipertimbangkan adalah:



People who represent themselves through lots of separate institutions are more easily divided and ruled. Orang yang mewakili diri mereka melalui banyak lembaga yang berbeda lebih mudah dipecah dan diatur.



But a single overarching institution, based in a nearby town, say, may not really be in touch with what community members think and want. Leaders may have interests of their own. Tetapi sebuah lembaga tunggal, berada didekat kota, misalnya, mungkin tidak bersentuhan dengan apa yang anggota masyarakat pikirkan dan inginkan. Pemimpin mungkin saja punya kepentingannya sendiri.

The key thing is to think through all who should be represented - men, women and children - and then choose the institutions you trust to do that.

Hal yang paling penting adalah memikirkan melalui semua orang seharusnya terwakili – laki-laki, perempuan dan anak-anak – dan kemudian memilih lembaga-lembaga yang anda percaya untuk melakukan hal itu.

## Customary institutions Kelembagaan Adat

Many indigenous peoples feel most comfortable representing themselves through their customary institutions, or by getting these to act jointly with other, newer institutions. Banyak masyarakat adat merasa sangat nyaman mewakilkan diri mereka melalui lembaga-lembaga adat mereka sendiri, atau dengan menyatukan lembaga-lembaga ini berkerja bersama dengan yang lain, lembaga-lembaga baru.

Especially where an indigenous people has not engaged in detailed negotiations with outsiders before, it is well worth taking time to think through what your customary institutions are and how they work before getting involved. Khusus dimana sebuah masyarakat adat belum terlibat dalam negosiasi yang panjang lebar dengan pihak luar, sebaiknya luangkan waktu untuk memikirkan melalui lembaga-lembaga adat apa dan bagaimana mereka berkerja sebelum terlibat.

As part of your preparations, sketch out your institutional structures, and reflect on their preparedness for the task they will have to face. How are these institutions chosen? Do their members represent all who will be affected? Do they report back the people and get their views before making final decisions? Can you control what they say and do? Sebagai bagian dari persiapan anda, gambarkan struktur lembaga, dan refleksikan seputar kesiapan mereka untuk tugas yang akan mereka hadapi. Bagaimana lembaga-lembaga tersebut dipilih? Apakah mereka mewakili semua orang yang akan terkena dampak? Apakah mereka melaporkan kepada rakyat dan mendapatkan pandangan-pandangan mereka sebelum membuat keputusan akhir?

Here is a 'map' that the Kanayatn Dayaks of West Kalimantan made of their institutions., as an example. Berikut adalah 'peta' yang dibuat orang Dayak Kanayatn dari Kalimantan Barat dari lembaga-lembaga mereka, sebagai contoh.

### Systems of decision-making Sistem pembuatan keputusan

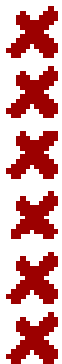
Think through what are the usual processes by which important decisions are made in the community. Who is involved in discussions? who gets consulted both in meetings and when things are chewed over informally? Who often gets left out – is that right? How are decisions finally reached? How are they enforced? Pikirkan melalui proses-proses apa yang sudah biasa melaluinya keputusan-keputusan penting dibuat didalam komunitas. Siapa yang terlibat didalam diskusi-diskusi? Siapa yang diajak bicara baik didalam pertemuan dan kapan hal-hal tersebut dibicarakan secara informal? Siapa yang seringkali diabaikan – apakah ini benar? Bagaimana keputusan-keputusan akhirnya dicapai? Bagaimana keputusan-keputusan tersebut ditegakan?

Few indigenous peoples entrust authority to single persons or institutions and then send them off to do deals without having ways of making them accountable to the group that they represent. Think through how to ensure that negotiators should report back to the communities not only after decisions are made but while negotiations are underway. Sedikit sekali masyarakat adat yang mempercayakan wewenang kepada satu orang tunggal atau lembaga-lembaga dan kemudian mengutus mereka untuk menangani urusan-urusan tanpa memilik cara-cara untuk membuat mereka bertanggung jawab kepada kelompok yang mereka wakili. Pikirkan bagaimana caranya memastikan bahwa negosiator hendaknya melaporkan kembali kepada komunitas tidak hanya setelah keputusan dibuat tetapi pada saat bersamaan ketika negosiasi sedang berlangsung.

Think through carefully how these processes of accountability usually work, in day to day decision-making, and if and how they can be applied to the new situation. Now ask yourself: are the decisions we are now being asked to make comparable to what we have always done or not? Pikirkan dengan seksama bagaimana proses-proses akuntabilitas biasanya berkerja, dalam pembuatan keputusan hari-hari biasa, dan jika dan bagaimana proses-proses tersebut dapat diterapkan kedalam situasi yang baru. Sekarang tanyakan diri anda: apakah keputusan-keputusan yang sekarang kita pertanyakan untuk membuat sama dengan apa yang selalu kita lakukan atau tidak?

Often they are not ! Seringkali keputusan-keputusan tersebut bukan!

Customary systems of decision-making may not have evolved to: Sistem adat pembuatan keputusan mungkin belum disusun pada:



sell timber jual kayu

cede or sell land sewa atau jual tanah

extinguish rights menghapus hak

agree to access to minerals setuju akses untuk mineral

set up and administer bank accounts membuat dan mengurus rekening bank

deal with large sums of money berurusan dengan uang dalam jumlah besar

If the deals to be done are very different from what has been usual in the past, then detailed community assessments are needed to decide how these new situations should be dealt with and what authority customary institutions should have in these circumstances. Jika urusan-urusan yang dilakukan sangat berbeda dari kebiasaan dimasa lalu, selanjutnya penilaian-penilaian mendalam komunitas diperlukan untuk memutuskan apakah situasi-situasi baru ini selayaknya ditangani dan wewenang apa seharusnya lembaga-lembaga adat miliki dalam keadaan-keadaan tersebut.

**Once deals have been struck it is hard to reverse them.  
Ketika kesepakatan telah mandek sulit untuk membalikkanya**

## **Deciding on a process Memutuskan sebuah proses**

One of the most important things about Free, Prior and Informed Consent is that it is a **process** not a one-off **event**. Salah satu yang paling penting mengenai FPIC adalah bahwa ini merupakan sebuah **proses** bukan suatu **peristiwa** satu-selesai tidak berulang lagi.

Decisions about whether indigenous lands should be logged, planted with oil palm, mined, dammed, crossed by a road or included in a national park are major decisions. They will have implications for tens or hundreds of years. People should not feel obliged to make such decisions in haste or all in one go. You have the right to demand time to weigh up the options, with the right information to hand, first. And remember, at any stage if the counterparts are proving disrespectful you can just stop negotiations and the deal should be halted. Keputusan tentang apakah tanah-tanah adat seharusnya ditebang, ditanam kelapa sawit, ditambah, dibendung, dilewati oleh jalan raya atau dimasukkan dalam taman nasional merupakan keputusan-keputusan besar. Keputusan tersebut memiliki implikasi-implikasi untuk puluhan atau ratusan tahun kedepan. Rakyat hendaknya tidak merasa diwajibkan untuk membuat keputusan semacam ini dalam keadaan tergesa-gesa atau semua keputusan satu sekaligus. Anda berhak meminta waktu untuk mempertimbangkan berbagai pilihan, pertama-tama dengan informasi yang benar ditangan. Dan ingat, pada tahap apapun jika teman berbuat tidak sopan anda dapat menghentikan perundingan dan urusan sebaiknya dihentikan.

So think through the steps that the negotiation should go through and then get those who are being negotiated with to agree to go through these stages. Oleh karena itu, pikirkan benar-benar langkah-langkah bahwa negosiasi hendaknya berjalan lancar dan kemudian upayakan mereka yang diajak berunding untuk sepakat melalui tahap-tahap ini.

1. A first phase may be to have time for community preparations, like those set out in the previous six pages. Sebuah tahap pertama mungkin menyiapkan waktu untuk berbagai persiapan komunitas, seperti yang tersusun didalam enam halaman sebelumnya.
2. A second phase may be to gather information. This does not mean just being given all the available documents. Maybe the information you want is not yet available. If so, then agree only to go as far as the stage of data gathering. Demand the information you need! If you are not informed its not informed consent. Tahap kedua mungkin mengumpulkan informasi. Ini tidak berarti hanya diberikan semua dokumen yang ada. Mungkin informasi yang anda inginkan belum tersedia. Jika ya, kemudian sepakati hanya sampai pada tahap mengumpulkan data saja. Minta informasi yang anda perlukan! Jika ada tidak diinformasikan ini bukan persetujuan yang diinformasikan.
3. Official systems of impact assessment may be perfunctory. Insist that the assessments look into issues of importance to the communities. Make sure the assessors work intensively with the communities to understand present systems of life and land use and how they will be changed if the development goes ahead. Sistem resmi penilaian dampak mungkin dapat bermanfaat. Tegaskan bahwa penilaian-penilaian tersebut mencermati isu-isu yang sangat bermanfaat bagi komunitas. Pastikan para penilai bekerja penuh dengan komunitas untuk memahami sistem kehidupan dan pemanfaatan lahan sekarang dan bagaimana mereka akan dirubah jika pembangunan jalan terus.
4. Once you have assembled all the information you need, the next stage is to have time to assess it, involving everyone who will be affected. You may want help in assessing this information (see 'getting the right advice' and 'analysing the information' below)? Ketika anda telah mengumpulkan semua informasi yang anda perlu, langkah selanjutnya adalah meluangkan waktu untuk memeriksanya, melibatkan semua orang yang akan dipengaruhi. Anda mungkin mau membantu memeriksa informasi ini (lihat 'dapatkan nasehat yang benar' dan 'menganalisa informasi' dibawah)?
5. Only once the information has been gathered and assessed should you feel it's fair to start negotiations in earnest. But here again, don't be rushed ! Negotiations should be staged, with time for reflection as options are assessed and offers weighed. Hanya ketika informasi telah dikumpulkan dan diperiksa anda hendaknya merasa cukup untuk memulai negosiasi dalam kesungguhan. Tetapi disini sekali lagi, jangan tergesa-gesa! Negosiasi hendaknya bertahap, dengan waktu untuk refleksi karena pilihan-pilihan dinilai dan tawaran-tawaran dipertimbangkan.
6. Decide who are going to be the negotiators. Decide how far they should go before bringing matters back to the community. Putuskan siapa yang akan menjadi negosiator. Putuskan sejauhmana mereka harus melangkah sebelum membawa persoalan kembali kepada komunitas.











Make sure a process is agreed that will allow you to take your time, to do things in stages, and to consult back with the communities. Memastikan sebuah proses disepakati yang memungkinkan anda untuk meluangkan waktu anda, melakukan hal-hal dalam tahapan-tahapan, dan bertanya kembali dengan komunitas.

**Don't agree to a process that will lead to hasty decisions.  
Jangan setuju pada sebuah proses yang akan mengarah pada keputusan gegabah.**

## Assess your counterparts Menilai rekan kerja anda

You can be sure that the people you will be negotiating with will have taken time to find out about you. Find out about them too, so you know who you will be dealing with! Anda dapat yakin bahwa orang yang ingin anda ajak berunding akan meluangkan waktu untuk mencari tahu tentang anda. Cari tahu tentang mereka juga, sehingga anda tahu dengan siapa anda akan berurusan!

Find out: Temukan:

-  what kind of project they are planning. apa jenis proyek yang sedang mereka rencanakan
-  everything you can about the kinds of impacts that these projects have semua anda dapat upayakan tentang jenis dampak dari proyek tersebut
-  if and how these impacts can be minimised. Jika dan bagaimana dampak-dampak dikurangi.
-  who owns the company or enterprise siapa punya perusahaan atau usaha tersebut
-  everything you can about the track record of the companies and investors semua anda dapat tentang catatan riwayat perusahaan dan investornya
-  how they have dealt with indigenous peoples in the past. If possible visit or get in touch with these people to find out what their experience has been like. Bagaimana mereka berurusan dengan masyarakat adat dimasa lalu. Jika memungkinkan kunjungi atau temui langsung orang-orang ini untuk mendapatkan seperti apa pengalaman mereka.
-  how they make decisions and the strategies and tactics they have used in previous negotiations Bagaimana mereka membuat keputusan dan strategi dan taktik yang telah mereka pakai dalam negosiasi sebelumnya.
-  who all the relevant parties are and what are their objectives siapa pihak-pihak berkenaan dan apa objektif mereka
-  who should represent them in negotiations. Make sure they send you someone with the authority to make commitments not just someone from public relations siapa seharusnya mewakili mereka dalam negosiasi. Pastikan mereka mengutus seseorang dengan wewenang untuk membuat komitmen, tidak hanya seorang dari hubungan masyarakat belaka.
-  find out what the 'best practice' standards for this kind of project are and demand that they aim to work to those standards temukan apa saja standar 'tata-kelola terbaik' untuk jenis proyek ini dan tuntut bahwa mereka bermaksud untuk berkerja terhadap standar-standar ini.

There are many NGOs that specialise in tracking the activities of certain companies and these can be a very valuable source of information and support. Ada banyak NGO yang mengkhususkan dalam melacak kegiatan-kegiatan perusahaan tertentu dan ini dapat menjadi sebuah sumber informasi dan dukungan yang sangat berguna.

Still, it is important to remember that they have their own agendas and priorities which may not be your own. Tetapi, penting untuk diingat bahwa mereka memiliki agenda dan prioritas mereka sendiri yang mungkin tidak sama dengan anda.

**Just because they give you help, often free of charge, does not mean you have to do what they suggest. You have to live with the direct consequences of any decisions, not they.**

**Hanya karena mereka membantu anda, seringkali tanpa biaya, tidak berarti anda harus melakukan apa yang mereka sarankan. Anda harus hidup dengan konsekuensi langsung dari setiap keputusan, bukan mereka.**

## Getting the right advice Mendapatkan nasehat yang benar

The issues you are confronting **are** complex. The companies have technical experts and lawyers to help them, why shouldn't you too? Isu-isu yang anda hadapi adalah rumit. Perusahaan-perusahaan memiliki pakar teknis dan pengacara untuk membantu mereka, mengapa tidak anda juga?

If you are recruiting help from outsiders, then you will need to get in people you can trust - people who not only have the expertise that you want but who will genuinely want to be at your service. Jika anda merekrut pertolongan dari pihak luar, kemudian anda akan perlu memasukan orang yang ada dapat dipercayai – orang yang tidak hanya memiliki keahlian yang anda inginkan tetapi juga orang yang benar-benar mau menjadi bagian pelayanan anda.

Sometimes getting this help is expensive. With a big project, you should be able to require the company, conservation agency or the government to provide you with funds to get such help. But, if you take this money, make sure you still have the right to choose who you get as an expert, not someone that they choose for you. Kadang-kadang mendapatkan pertolongan ini tidak murah. Dengan sebuah proyek besar, anda hendaknya bisa meminta perusahaan, lembaga konservasi atau pemerintah menyediakan anda dana untuk mendapatkan pertolongan semacam ini. Tetapi, jika anda mengambil uang ini, pastikan anda masih punya hak untuk memilih siapa yang anda pasang sebagai pakar, tidak seseorang yang mereka pilih untuk anda.

A really big project will have major implications and may require a great variety of people with different bodies of knowledge that you can ask for to help you make up your minds about whether or not to accept a plan. Sebuah proyek yang sangat besar akan memiliki implikasi besar dan mungkin memerlukan banyak orang dari latar belakang pengetahuan yang berbeda yang dapat anda minta untuk membantu anda mengarahkan pikiran-pikiran anda mengenai apakah menerima rencana tersebut atau tidak.

If you use these outside helpers makes sure you take time to explain to them how you see things from your own point of view, what issues you think are important and what aspects you find confusing. Jika anda gunakan penolong dari luar pastikan anda punya waktu untuk menjelaskan kepada mereka sekarang anda melihat banyak hal dari sudut pandang anda sendiri, isu apa yang sedang anda pikirkan penting dan aspek apa saja yang anda temukan membingungkan.

Then when they offer advice, make sure you understand what you are being told. It may be technical information which anyone would find hard to understand. Don't be intimidated. Kemudian ketika mereka menawarkan nasehat, pastikan anda memahami apa yang disampaikan kepada anda. Mungkin hal berupa informasi teknis yang siapapun akan kesulitan memahaminya. Jangan ketakutan.



Take time to understand what you are being told and if things aren't clear then ask for clarifications. Luangkan waktu untuk memahami apa yang disampaikan kepada anda dan jika hal-hal tertentu tidak jelas selanjutnya mintalah klarifikasi.



In the end you should feel free to either take or reject their advice. Pada akhirnya anda seharusnya merasa bebas untuk menerima ataupun menolak nasehat mereka.



They may be trying to help but only you know your own priorities. Mereka mungkin mencoba untuk menolong tetapi hanya anda yang tahu prioritas anda sendiri.



Remember, the decisions are the people's not the experts'. Ingat, keputusan-keputusan ada pada rakyat bukan ahli.

## Analysing the information Menganalisa informasi

Once you have assembled all the available information and advice, you need to make best use of it so it is widely understood. How you do this will depend on what the project is and how you feel comfortable sharing information and discussing such issues. Frequently used measures include the following: Ketika anda telah mengumpulkan semua informasi dan nasehat yang telah tersedia, anda perlu menggunakannya dengan sebaik-baiknya sehingga dipahami secara luas. Bagaimana anda melakukan hal ini akan tergantung pada apa proyeknya dan bagaimana anda merasa nyaman berbagi informasi dan mendiskusikan isu semacam itu. Tingkatkan penggunaan ukuran-ukuran termasuk hal-hal berikut:



Hold public meetings to ensure the information is widely shared Adakan pertemuan publik untuk memastikan informasi disampaikan secara luas



Devise ways of involving all affected parties, so they are informed and can participate in discussions, including other peoples who share your territory, women and children, the elderly and people who can't read. Merencanakan cara-cara melibatkan seluruh pihak terkena dampak, sehingga mereka terinformasikan dan dapat berpartisipasi dalam diskusi-diskusi, termasuk orang lain yang berada di kawasan anda, perempuan dan anak-anak, orang tua dan mereka yang tidak bisa membaca.



Mobilise your own 'experts', like people with a lot of knowledge of the environment or the kind of business you are dealing with. Get them to examine the information and share their views about the proposal. Memobilisasi 'pakar' yang anda miliki, seperti orang yang memiliki pengetahuan lingkungan atau jenis bisnis yang sedang anda tangani. Libatkan mereka untuk memeriksa informasi dan bertukar pandangan mereka tentang usulan tersebut.



Especially for complex or large projects, you may need to have the information summarized in short booklets or briefings and ask your 'experts' and 'advisors' to explain these issues. Khusus untuk proyek-proyek rumit atau besar, anda mungkin perlu meringkas informasi dalam booklet atau tulisan singkat dan tanyakan 'pakar' dan 'penasehat' anda untuk menjelaskan isu-isu tersebut.



Often effective participation will depend on good translation so the technical ideas of the project proponents can be expressed in terms that make sense to the local communities. Seringkali partisipasi yang mengesankan akan tergantung pada penerjemahan yang baik ide-ide teknis proyek yang diajukan pihak pengusul dapat diungkapkan dalam istilah-istilah yang dapat dipahami oleh masyarakat lokal.



Project proponents should provide the resources needed to ensure this translation. You may need a team of translators to work with the communities throughout the negotiations. Para pendukung proyek hendaknya menyediakan sumber-sumber yang diperlukan untuk memastikan penerjemahan ini. Anda mungkin perlu sebuah tim penerjemah untuk bekerja dengan komunitas-komunitas melalui negosiasi.

Some key things to look for in the information are: Beberapa hal yang sangat penting untuk dicari dalam informasi adalah:



What are the objectives of the project Apa tujuan proyek tersebut



Does the company really appreciate the extent of indigenous lands, rights and the way you make a living from your territory? Apakah perusahaan benar-benar menghargai luas tanah adat, hak-hak dan bagaimana masyarakat adat pola kehidupan mereka dari kawasan anda?



What are the expected benefits for the communities? Do these seem plausible? Apakah manfaat yang diharapkan bagi komunitas? Apakah manfaat tersebut kelihatan masuk akal?



What are the impacts likely to be. Are there impacts they are overlooking? Apa saja kemungkinan dampak-dampaknya. Apakah ada dampak yang mereka abaikan?

## Entering into negotiations Memasuki negosiasi

Once you are properly informed about the proposed project and have analysed its potential impacts – good and bad – you may feel ready to go to the next step. But you need to prepare for negotiations thoughtfully. Ketika anda sudah benar-benar diinformasikan mengenai proyek yang diajukan dan telah menganalisa dampak potensinya – baik dan buruk – anda mungkin merasa siap untuk melangkah ke proses selanjutnya. Tetapi anda perlu mempersiapkan bagi negosiasi yang bijaksana.

Select your own negotiators through a public process, designed to ensure the full participation and, as far as possible, consensus of all parts of the community. Pilih sendiri para negosiator anda melalui sebuah proses publik, dibuat untuk memastikan partisipasi penuh dan, sedapat mungkin, konsensus dari segenap bagian masyarakat.

Organize community meetings and build consensus around a negotiating plan, which includes clear and specific needs, goals, strategies and acceptable tactics. Adakan pertemuan masyarakat dan bangun konsensus seputar rencana negosiasi, yang mencakup kebutuhan yang jelas dan khusus, tujuan, strategi dan taktik yang dapat diterima.

Ensure that indigenous ‘experts’ participate directly in planning and evaluating each step of the negotiations. Try to build a team of negotiators which reflects the diversity of skills and viewpoints that exist within the community. Memastikan bahwa ‘pakar’ pribumi berpartisipasi langsung dalam perencanaan dan mengevaluasi setiap langkah negosiasi. Coba untuk membentuk tim negosiator yang mencerminkan keragaman keterampilan dan pandangan yang terdapat didalam masyarakat.

Before agreeing to sit down to face to face negotiations, establish clearly that your counterparts respect the principles of Free, Prior and Informed Consent. This means that they should explicitly: Sebelum menyepakati untuk duduk berhadapan tatap muka negosiasi, bangun dengan jelas bahwa lawanmain anda menghargai prinsip FPIC. Ini berarti mereka hendaknya secara tegas:



Recognise that the indigenous peoples are the land-owners mengakui bahwa masyarakat adat adalah pemilik-lahan



Have the right to say ‘Yes’ or ‘No’ to the overall project or to parts of it Memiliki hak untuk mengatakan ‘Ya’ atau ‘Tidak’ terhadap bagian-bagian tertentu atau keseluruhan proyek tersebut.



Can choose to exclude areas of importance to them from the project Dapat memilih untuk mengabaikan wilayah-wilayah kepentingan bagi mereka dari proyek tersebut.



Are only likely to agree to the project if they can see it will offer them long-term benefits. Hanya akan menyetujui proyek tersebut jika mereka dapat melihat bahwa proyek tersebut akan menawarkan mereka manfaat-manfaat jangka panjang.



Have the right to take their time, get counsel and make decisions in their own way Memiliki hak untuk meluangkan waktu, berunding dan membuat keputusan-keputusan dengan cara mereka sendiri.



Choose their own negotiators and representatives Memilih wakil para negosiator dan perwakilan mereka

You may want to get a signed agreement - a ‘negotiation protocol’ or a ‘letter of intent’ - before you go ahead. Anda mungkin mau mendapatkan kesepakatan yang ditanda-tangani – ‘protokol negosiasi’ atau ‘surat pernyataan’ – sebelum melangkah maju.

If later your counterparts go back on this commitment you have clear grounds to repudiate the whole process. Jika kemudian lawan anda kembali pada komitmen ini anda punya alasan yang jelas untuk menolak keseluruhan proses tersebut.

## Negotiation tactics Taktik negosiasi

Remember the initial offers of the government or company are probably not as generous as the terms they may eventually accept. So it's quite logical and fair that your own initial demands may be for more than you are prepared to settle for. Ingat tawaran-tawaran awal dari pemerintah atau perusahaan mungkin tidak sebaik sebagaimana syarat-syarat yang mungkin pada akhirnya mereka terima. Jadi sangat masuk akal dan adil bahwa anda tuntutan awal anda mungkin jauh dari yang anda persiapkan untuk diterima.

In preparing for negotiations, therefore, it is useful to first set out your maximum demands but also to have prepared fall back positions, which may include the final fall back of 'no' to the project. Oleh karena itu, dalam persiapan untuk negosiasi, adalah penting untuk pertama-tama menyusun tuntutan maksimum tetapi juga siap untuk kembali pada posisi awal, yang mungkin kembali pada langkah akhir untuk 'tidak' kepada proyek tersebut.

You can also decide how you want to deal with the counterparts. There are both advantages and disadvantages to being polite and approachable, or reserved and cautious. Choose the approach that is comfortable for you. Bear in mind that you will probably be dealing with people from a different culture. It may even be necessary to get angry at the right moment to force your counterparts to realise you are serious, but usually processes based on mutual respect help engender trust and lay the basis for fairer deals. Anda dapat juga memutuskan bagaimana anda mau berurusan dengan tandem anda. Ada beberapa kekurangan dan kelebihan menjadi sopan dan mudah didekati, atau pendiam dan berhati-hati. Pilih pendekatan yang nyaman bagi anda. Tetap pertimbangkan bahwa mungkin anda akan berurusan dengan orang dari sebuah budaya yang berbeda. Bahkan mungkin juga perlu untuk marah pada saat yang tepat untuk menekan rekan anda untuk menyadari anda sungguh-sungguh, tetapi biasanya proses-proses yang didasarkan pada sikap saling menghargai membantu melahirkan kepercayaan dan meletakkan dasar untuk perjanjian yang lebih adil.

Often you will be dealing with powerful companies, agencies or government bodies who will enjoy political connections and financial backers. These players, behind the scenes, will often be as influential in decision-making as those you deal with upfront. Seringkali anda mungkin akan berurusan dengan perusahaan yang sangat kuat, badan atau lembaga pemerintah yang akan menikmati hubungan politik dan dukungan keuangan. Para pemain ini, dibalik layar, seringkali akan sama pengaruhnya dalam pembuatan keputusan seperti mereka anda hadapi dibagian terdepan.

Remember, though, that their points of influence can also offer you points of leverage. Analyse these in advance and decide on tactics you can use to lobby for your demands, both directly and indirectly. Walaupun demikian, ingat pengaruh pendapat-pendapat mereka dapat juga menawarkan anda maksud-maksud dari pengaruh. Analisa pendapat tersebut dan putuskan taktik yang dapat anda pakai mempengaruhi bagi tuntutan anda, baik langsung dan tidak langsung.

Think about how you can use the media, your NGO allies and your own connections with local politicians and national indigenous organisations, to push your side of the deal. Pikirkan tentang bagaimana anda dapat menggunakan media, NGO pendukung anda dan penghubung anda dengan tokoh politik lokal dan organisasi masyarakat adat nasional, untuk memperkuat pihak anda pada perjanjian.

It may be important, however, to respect confidentiality in the negotiations. Your counterparts may not feel able to reveal commercially or politically sensitive information if they feel you will immediately make this public. Walaupun demikian, mungkin juga penting, untuk menghargai kerahasiaan dalam negosiasi. Rekan anda mungkin tidak merasa dapat mengungkapkan informasi yang secara komersial atau politik sangat sensitive jika mereka merasa anda akan segera mempublikasikannya.

**Agreement about public disclosure and confidentiality is often an early part of negotiations. Think through how much you want negotiations to be public and how much behind closed doors. Kesepakatan mengenai keterbukaan umum dan kerahasiaan seringkali merupakan bagian awal dari negosiasi. Pikirkan sebanyak mana anda mau negosiasi secara terbuka dan seberapa banyak negosiasi di ruangan tertutup.**

## Reaching agreement Mencapai kesepakatan

What you eventually want in an agreement depends on many things – most of all on whether you decide to say ‘Yes’ or ‘No’ to the project. Apa yang akhirnya diinginkan dalam sebuah kesepakatan tergantung banyak hal – terutama sekali mengenai apakah anda memutuskan untuk mengatakan ‘Ya’ atau ‘Tidak’ terhadap proyek tersebut.

If you decide to say ‘yes’, you will probably want to say ‘yes’ on condition that certain benefits are secured and measures taken to limit impacts. Here are some typical conditions but the details will depend on many things especially what kind of project it is. Jika anda memutuskan mengatakan ‘ya’, anda mungkin akan mengatakan ‘ya’ dalam keadaan bahwa manfaat tertentu dicapai dan berbagai tindakan diambil untuk membatasi berbagai dampak. Berikut adalah beberapa keadaan khusus tetapi lengkapnya akan tergantung pada banyak hal khususnya apa jenis proyek tersebut.



Zoning of activities to protect or exclude vulnerable, sacred or culturally important areas or species Membatasi ruang kegiatan untuk melindungi atau mengeluarkan wilayah-wilayah rentan, kawasan keramat atau kawasan penting budaya atau spesies tertentu.



Strict adherence to proven measures to protect and restore the environment Memperketat ketaatan atas syarat-syarat yang terbukti melindungi dan memulihkan kembali lingkungan.



Clarity about where local people will continue their livelihood activities and where counterpart activities will occur Kejelasan tentang dimana rakyat setempat akan melanjutkan kegiatan mata pencaharian mereka dan dimana kegiatan pihak lain akan terjadi.



Compensation for any properties or livelihood systems that will be affected by the projects. Kompensasi untuk harta benda apa saja atau sistem mata pencaharian yang akan terkena dampak proyek-proyek tersebut.



Measures to ensure that compensation reaches those who are directly affected. Tindakan untuk memastikan bahwa kompensasi sampai kepada mereka yang terkena dampak langsung.



Preferential training for local people and access to jobs or opportunities. Pelatihan khusus bagi penduduk lokal dan jalan untuk mendapatkan pekerjaan dan peluang-kesempatan.



Benefit-sharing and provision of services (education facilities, clinics, roads, places of worship, cultural centres etc.) Pembagian-manfaat dan pengadaan pelayanan (fasilitas pendidikan, klinik, jalan, tempat ibadah, pusat budaya, dll.)



Royalty payments, profit-sharing schemes or joint ownership schemes. Pembayaran bagian, skema bagi-untung atau skema kepemilikan bersama.



Mechanisms to ensure the transparent and equitable administration of funds for community benefit Mekanisme untuk memastikan administrasi yang terbuka dan berkeadilan atas dana bagi kepentingan komunitas.



Mechanisms to negotiate on-going management plans and resource use Mekanisme untuk negosiasi rencana-rencana pengelolaan dan penggunaan sumber daya yang sedang berjalan.



Capacity building of indigenous peoples’ institutions Pengembangan kapasitas lembaga masyarakat adat



No use of private armies or payment of State security services by companies or other agencies. Tidak ada penggunaan pasukan pribadi atau pembayaran terhadap jasa keamanan negara oleh perusahaan atau badan-badan lain.

## Monitoring compliance

### Monitoring pemenuhan

Once you have an agreement, it will be the responsibility of **both** parties to uphold the terms of the agreement. To check that this is happening, it is useful to set up a monitoring team who are trusted by both parties to oversee this. Ketika anda memiliki sebuah kesepakatan, ini akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak untuk menegakkan syarat-syarat perjanjian tersebut. Untuk memeriksa hal ini terjadi, adalah penting untuk membentuk sebuah tim monitoring yang dipercaya oleh kedua belah pihak untuk memantau hal ini.

There are two main ways of monitoring. Ada dua cara penting dalam monitoring:



Establish a joint monitoring team made up of representatives from both the indigenous people and the government or company, making full use of indigenous knowledge. Bangun sebuah tim monitoring bersama terdiri dari perwakilan baik dari masyarakat adat dan pemerintah atau perusahaan, upayakan pengetahuan adat benar-benar digunakan.



An independent third party that periodically comes in to audit compliance. Sebuah badan pihak ketiga independen yang datang secara berkala untuk memeriksa pemenuhan.

Often the best solution, though this is costly, is to have both kinds of monitoring. The local counterparts monitor the project all year round while the external auditors make periodic visits to check up on things and listen to the concerns of both parties. Seringkali solusi terbaik, walaupun ini mahal, adalah menerapkan dua bentuk monitoring tersebut. Rekan-rekan lokal memantau proyek tersebut sepanjang tahun sementara auditor dari luar membuat kunjungan berkala untuk memeriksa berbagai hal dan mendengar keprihatinan dari kedua belah pihak.

Where there is rule of law and government bodies have proved trustworthy then large-scale projects should also be subject to independent regulation by a government agency. Dimana ada aturan hukum dan badan pemerintah yang telah terbukti dapat dipercaya selanjutnya proyek-proyek skala besar juga hendaknya dibawah peraturan tersendiri oleh sebuah badan pemerintah.

Monitoring should take into account: Monitoring hendaknya memperhitungkan:



Impacts and mitigation measures identified in the environmental and social impact assessments. Berbagai dampak dan upaya-upaya menguranginya diidentifikasi didalam penilaian dampak-dampak lingkungan dan sosial.



Changes to livelihoods, health, incomes and the environment against the base lines established in the initial assessment Perubahan terhadap mata pencaharian, kesehatan, pemasukan dan lingkungan hidup terhadap batas-batas yang dibangun dalam penilaian terdahulu.



The views and complaints of all parties concerned, taken special measures to include those who typically do not participate actively in public forums Pandangan dan pengaduan dari semua pihak yang kuatir, diambil langkah-langkah khusus untuk memasukan pihak yang tidak aktif ikut serta dalam pertemuan publik.



Implementation of all activities and benefit sharing measures established in the agreement. Pelaksanaan semua kegiatan dan syarat-syarat pembagian manfaat dibangun dalam kesepakatan.

## Dealing with grievances Menangani pelanggaran

Few projects ever turn out exactly as planned. Unforeseen impacts and benefits and misunderstandings usual emerge during a project. The monitoring programme should help identify these issues but you also need an agreed mechanism to deal with problems when they come up. Sedikit sekali proyek yang pernah benar-benar menjadi seperti yang direncanakan. Berbagai dampak dan manfaat serta kesalahpahaman yang tidak terduga biasa muncul selama proyek. Program monitoring hendaknya membantu mengidentifikasi persoalan tersebut tetapi anda juga perlu sebuah mekanisme yang disepakati untuk mengurus berbagai permasalahan ketika muncul.

Agreements should thus: Oleh karena itu, kesepakatan hendaknya:



Include measures for the identifying and registering complaints and grievances Memasukan tindakan-tindakan untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan berbagai pengaduan dan pelanggaran.



Establish mutually accepted mechanisms for the arbitration of disputes, with joint implementation of sanctions and remedial measures. These may be customary legal processes or hybrid mechanisms agreed during negotiations. Bangun mekanisme yang saling menguntungkan untuk arbitrase sengketa, dengan penerapan bersama sanksi dan tindakan-tindakan pemulihan. Upaya-upaya tersebut mungkin merupakan proses hukum adat atau pengembangan mekanisme yang disepakati selama perundingan.

The main thing is to have dispute resolution mechanisms that are accepted by all parties and which can act quickly, even proactively, so disputes do not escalate. Hal yang paling utama adalah memiliki mekanisme resolusi sengketa yang diterima oleh semua pihak dan dapat bergerak cepat, bahkan pro aktif, sehingga sengketa tidak berkembang luas.

## Legalising agreements Mengesahkan kesepakatan

Once agreements have been reached, it will be necessary to get them properly witnessed and legalised. This can be done by getting these agreements signed by legitimate representatives of all affected parties, usually in a public ceremony subject to customary practices, and then endorsed by a local notary. Ketika kesepakatan telah dicapai, adalah penting memastikan apakah kesepakatan-kesepakatan tersebut disaksikan dan disahkan dengan benar. Ini dapat dilakukan dengan memastikan kesepakatan ditanda-tangani oleh perwakilan yang sah dari semua pihak yang terkena dampak, biasanya dalam sebuah perayaan umum berkaitan dengan kebiasaan adat, dan kemudian dikukuhkan oleh notaris setempat.

Where the terms of agreements exceed what has been required by government, for example in terms of recognition of customary rights in land and natural resources, it will also be necessary to get the local governments and legislatures to endorse such agreements. Dimana syarat-syarat kesepakatan melebihi apa yang telah diwajibkan pemerintah, misalnya dalam hal pengakuan terhadap hak adat pada tanah dan sumber daya alam, juga akan perlu melibatkan pemerintah daerah dan legislatif untuk mengukuhkan kesepakatan-kesepakatan tersebut.

This can be done by getting the *bupati* to sign the agreement as a witness and then to have the agreement recognised through a *Perda*. Where the area in the negotiation overlaps two districts it may be necessary to get two *Perda* or secure Provincial approval. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukan Bupati untuk menanda tangani kesepakatan tersebut sebagai saksi dan kemudian membuat kesepakatan tersebut diakui melalui sebuah Perda. Dimana kawasan pada negosiasi tersebut berada pada dua kabupaten mungkin perlu membuat dua Perda atau mendapat pengesahan Propinsi.

Tujuannya adalah untuk mencapai kontrak yang disepakati bersama, resmi dan secara hukum dapat ditegakkan, mengikat pada semua pihak dan dapat ditegakkan melalui pengadilan nasional.